

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, ctk ke-11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Deviani, Eka dan Yudhi, Rifka, *Hukum Kepegawaian: Historisitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.
- Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Halim, *Sistem Merit Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Kepegawaian Aparatur Sipil Negara*”, Grup penerbitan CV Budi Utama, ctk ke-2, Yogyakarta, 2022.
- Hartini, Sri, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartini, Sri, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, ctk ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, ctk ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Huda, Ni’matul, *Ilmu Negara*, ctk ke-11, Rajawali Pres, Depok, 2019.
- Hyronimus Rhiti, *Kepastian Hukum Pengantar Teoretis dan Filosofis*, PT Kanisius, Sleman, 2025.
- J. Suyuthi Pulungan, M.A. , *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Edisi Revisi*, ctk ke-5 , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Kartina, Rita dan Krustiyati, Atik, *Kepegawaian Dalam Pemerintahan di Indonesia*, ctk ke-1, Damera Press, Jakarta Selatan, 2023.

- Manan, Bagir, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, RajaGrafindo Persada, 1994.
- Marbun, S.F. dan MD, Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, ctk ke-5, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Marbun, S.F., *Hukum Administrasi Negara 1*, ctk ke-1, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm 259.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, ctk ke-1, Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, ctk ke-10, PRENADAMEDIA GRUP, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk ke-1, Kencana, Jakarta, 2008.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, ctk ke-1, edisi pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992.
- Putra, Eduard Awang Maha, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta, 2024.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, ctk ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ridwan dan Harahap, Nurmalita Ayuningtyas, *Hukum Kepegawaian*, ctk ke-1, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, ctk ke-1, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik-Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, ctk ke-6, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ichtiar Baru, Cetakan ke-9, Jakarta, 1986.

Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, ctk ke-1, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Karya Ilmiah

Khayadina, “Tinjauan Yuridis Penataan Pegawai Non-Asn: Analisis Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Kurniawan, Ravi Cahya, “Pengaruh Perubahan Status Pegawai Non ASN sebagai Pegawai Alih Daya di Pemerintah Kabupaten Semarang”, *Skripsi*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2022.

Jurnal

Adilla Rahmatushiva, “Analisis Penataan Kepegawaian ASN di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer Pada UU Nomor 20 Tahun 2023”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 2, No 4, 2024.

Ahmad Mustakim dan M, Shinwanuddin “Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) Dalam Konteks Indonesia, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* vol 4 No 2, 2024.

- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2019.
- Artayasa, I Nyoman, “Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Ilmu Hukum”, *Jurnal Cakrawati*, Vol 2 No.1, 2019.
- Auliya, Uswatun Nur, "Analisis Manajemen Kinerja dalam Penataan Tenaga Non-ASN oleh Kementerian PANRB", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol 2, no 6, 2025.
- D., Baiq Dessyazizah dan F., Restu Agung, “Analisis Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan”, *Jurnal Syntax Idea*, vol 6 no 2 Februari, 2025.
- Dewi, Ayu Lestari, dkk, “Meritokrasi terhadap Pengaturan Kebijakan dan Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Lingkup Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 3 No. 3, 2023.
- Emirza Nur Wicaksono, "Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian Negara Indonesia", *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol 3, No 1, 2025.
- Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Mimbar Hukum*, Vol 19, No. 3, 2007.
- Futri Amelia A, Lapaja dkk, “SIYh Siyasah Terhadap Problematika Pegawai Honorer” *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 3 No 1, 2022.

- Gusti Ayu Ratih Damayanti, “*Freies Ermessen* Dalam Konsep Negara Kesejahteraan”, *Jurnal Advokasi*, Universitas Islam Al-Azhar Mataram, 2016.
- Halilah, Siti, "Instrumen (Sarana) Tindak Pemerintahan", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 6, 2023.
- Hamada, Nourismi dan Erlina, “Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Dalam Sistem Kepegawaian”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 8, No 5, 2025.
- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas, “Tinjauan Terhadap Penataan Pegawai Non-ASN Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dalam Perspektif Ilmu Hukum Profetik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 13 No.1, Juni, 2024.
- Ida Bagus Gede Angga, “Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non-ASN,” *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol 2, No 2, 2020.
- Juniarta, Ida Bagus Gede Angga, “Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Non-ASN”, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol 2 No. 2, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2020.
- Lamijan, “Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Buruh Dalam Memperoleh Hak Kehidupan Yang Layak”, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol 1, No 2, 2020.
- Mohamad Taufik, “Dampak Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Terhadap Pemerintah Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Rendah”, *Jurnal Impresi Indonesia*, vol 4, no 5, 2025.

Mustafid, Hidayat, “Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Budaya Organisasi”, *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, Vol 3 No.1, 2017.

Ni Komang E.L. & I Gede Agus P.Y., “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai ASN dan Non ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol 12 No.1 Januari-April, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2022.

Nourismi Hamada dan Erlina, "Kedudukan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Dalam Sistem Kepegawaian", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 8, No 5, 2025.

Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Mewujudkan Sistem Meritokrasi Pasca Lahirnya Kewenangan Penjabat Kepala Daerah untuk Memutasi Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 31, 2024.

Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Tinjauan Terhadap Penataan Pegawai Non-ASN Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dalam Perspektif Ilmu Hukum Profetik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 13, No 1, 2024.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Prasojo, Eko dan Kurniawan, Teguh, “Manajemen Kepegawaian Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, vol 7 no 2, 2013.

- Pratama, Aji Anillah Andika, “Reformasi Tenaga Honorer: Studi Perbandingan Kebijakan Penataan Tenaga Honorer 5 Negara”, *Jurnal Comserva*, Vol 5 No.1 Mei, Universitas Airlangga, 2025.
- Qomarani, Legina Nadhila, “Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Cakrawala Kepegawaian di Indonesia”, *Cepalo*, Vol 4 No.2 Juli-Desember, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, ctk ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Safrida A & Stephani A, “Analisis Sistem Meritokrasi dalam Rekrutmen dan Promosi Jabatan ASN dengan Pendekatan SWOT terhadap Tantangan dan Strategi Penguatan Meritokrasi di Indonesia”, *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, Vol 2 No.2, 2025.
- Sela Nopitasari dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Bagi Pekerja Honorer Dalam Perspektif Hukum Keperdataan Indonesia”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10 No. 1, 2024.
- Setyawati, dkk, “Strategi Implementasi Kebijakan Penataan Pegawai Non ASN di Kabupaten Bengkalis”, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol 3 No.5, 2024.
- Wahyudin, Latif, dkk, “Penataan Pegawai Non-ASN Ditinjau Dari Etika Birokrasi”, *Co-value: jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, Vol 14 No.7, 2023.

Wicaksono, Emirza Nur, "Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian Negara Indonesia", *Journal of Contemporary Laws Studies*, vol 3, no 1, 2025.

Yik Soleh Assegaf dan Widhi Chayo Nugroho, "Perlindungan Hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia", *Media Hukum Indonesia*, Vol 4, No 1, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Data Elektronik

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, “Akhir Pendataan Tenaga Non-ASN, Kementrian PANRB Imbau Instansi Pemerintah Verifikasi dan Validasi Data”, terdapat dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akhir-pendataan-tenaga-non-asn-kementerian-panrb-imbau-instansi-pemerintah-verifikasi-dan-validasi-data>, diakses pada 1 oktober 2025.

Publikasi Badan Kepegawaian Negara, “Kepala BKN: PPPK Paruh Waktu sebagai Solusi Non-ASN Database BKN Mendapatkan Kepastian Hukum”, <https://www.bkn.go.id/kepala-bkn-pppk-paruh-waktu-sebagai-solusi-non-asn-database-bkn-mendapatkan-kepastian-hukum/>, diakses pada 26 Desember 2025.

BKN Pekanbaru, “Regulasi Baru Seleksi PPPK 2025: Pemerintah Percepat Penataan Pegawai Non-ASN di Indonesia”, terdapat dalam https://pekanbaru.bkn.go.id/home/regulasi-baru-seleksi-pppk-2025-pemerintah-percepat-penataan-pegawai-non-asn-di-indonesia/?utm_source, diakses pada 8 Januari 2026

Badan Kepegawaian Negara, “Pendataan Non ASN BKN: Pengertian, Persyaratan, Proses, dan Perkembangan Terbaru 2025”, terdapat dalam

<https://www.bkn.go.id/layanan/pendataan-non-asn/>, diakses pada 1 Januari 2026.

Yoyok Setyo Langgeng dan Mega Fitrya Wilasari “Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi” *Nusantara Innovation Journal* Vol. 2, No. 2, 2023, hlm 104.

KPU, “Pendataan Non ASN BKN: Pengertian, Persyaratan, Proses, dan Perkembangan Terbaru 2025”, terdapat dalam https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8735_pendataan-non-asn-bkn-pengertian-persyaratan-proses-dan-perkembangan-terbaru-2025, diakses pada 9 Januari 2026.

ANTARA, “Isi Keputusan Menpan RB No 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu”, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/4588022/isi-keputusan-menpan-rb-no-16-tahun-2025-tentang-pppk-paruh-waktu> , diakses pada 8 Januari 2026.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Kementerian PANRB Uraikan Mekanisme Pengadaan PPPK Paruh Waktu”, terdapat dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-uraikan-mekanisme-pengadaan-pppk-paruh-waktu> , diakses pada 8 Januari 2026.

Kumparan, "Apa Itu P3K Paruh Waktu dan Bagaimana Sistem Kerjanya", terdapat dalam <https://kumparan.com/berita-terkini/apa-itu-p3k-paruh-waktu-dan-bagaimana-sistem-kerjanya-25pLTrBiyVh/full> , diakses pada 13 Januari 2026.